

SKRIPSI
**RELAWAN DEMOKRASI BASIS PEREMPUAN DI KABUPATEN
MAJENE PADA PEMILU TAHUN 2019**



Disusun Oleh :

WAHYUDDIN

E111 15 001

**PRODI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**RELAWAN DEMOKRASI BASIS PEREMPUAN DI KABUPATEN
MAJENE PADA PEMILU TAHUN 2019**

Disusun dan diajukan oleh:

WAHYUDDIN


(E111 15 001)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Gustiana A. Kambo, S.Ip, M.Si
NIP. 197308131998022001

Ummi Suci Fathiya B, S.Ip, M.Ip
NIP. 199205022019044001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub, M.Si, P.hD
NIP. 196212311990031023

**HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI**

**RELAWAN DEMOKRASI BASIS PEREMPUAN DI KABUPATEN MAJENE PADA
PEMILU TAHUN 2019**

Disusun dan di ajukan oleh:

WAHYUDDIN

E111 15 001

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitian ujian skripsi

Pada program studi Ilmu Politik

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada 12 Juli 2021

Menyetujui

Panitia Ujian

Ketua : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si (.....)

Sekretaris : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP (.....)

Anggota : Prof. Dr. Muhammad, M.Si. (.....)

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si (.....)

Pembimbing 1 : Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si (.....)

Pembimbing 2 : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyuddin

Nim : E11115001

Program Studi : Ilmu Politik

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

“Relawan demokrasi basis perempuan di Kabupaten Majene pada pemilu tahun 2019” adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Agustus 2021

Yang menyatakan



Wahyuddin

ABSTRAK

Pada pemilihan umum tahun 2019 dilakukan secara serentak, yaitu pemilihan anggota legislative dan presiden. Hal ini dilaksanakan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilihan serentak Yang bertujuan untuk meminimalkan penggunaan biaya pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, penyalanggunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah. Pemilihan serentak tahun 2019 yang pertama di Indonesia ini menjadi tantangan tersendiri dari komisi pemilihan umum (KPU) selaku Lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilih perempuan menjadi salah satu segmen pemilih strategis dalam sosialisasi politik yang dilaksanakan KPU Kabupaten Majene selain karena populasinya yang lebih tinggi dari laki-laki, juga karena ada kecenderungan penurunan kuantitas memilih pada segmen perempuan.

KPU Kabupaten majene menargetkan angka 85 % angka partisipasi pada pemilu 2019 dengan harapan pemilih perempuan mengalami peningkatan dalam menggunakan hak pilihnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui pengumpulan data dari wawancara dan dokumentasi lapangan. Hasil dan pembahasan mengungkapkan bahwa KPU melalui anggota relawan demokrasi basis perempuan berhasil menggunakan strategi yang tepat dalam mendorong peningkatan jumlah partisipasi khususnya perempuan di Kabupaten majene dengan memetakan dan mencari solusi dari permasalahan yang selama tahun-tahun sebelumnya menjadi penyebab semakin menurunnya angka partisipasi perempuan

Kata Kunci : *Pemilu, KPU, Relawan Demokrasi, Perempuan, Kabupaten Majene*

ABSTRACT

In the general election in 2019 conducted simultaneously, namely the election of legislative members and presidinets. This is implemented based on the decision of the constitutional court no. 14/PUU-11/2013 on simultaneous elections which aims to minimize the use of the cost of conducting elections, minimizing the politics of high costs for election participants, the abuse of power or preventing the politicization of bureaucracy, and streamlining government work schemes. The first election in 2019 in Indonesia is a challenge from the electoral commission (KPU) as the state institution that organizes elections. Female voters become one of the strategic voter segments in the political socialization implemented by the Majene District KPU in addition to its higher population than men, also because there is a tendency to decrease the quantity of votes in the female segment.

KPU Kabupaten majene targets 85% participation rate in the 2019 elections in the hope that female voters will experience an increase in the use of their suffrage. The research method used in this study uses quantitative method through data collection from interviews and documentation in the field. The results and discussions revealed that the KPU through the volunteer members of the women's base democracy successfully used the right strategy in encouraging an increase in the number of participation, especially women in majene district by mapping and finding solutions to problems that during the previous years became the cause of the decreasing number of women's participation

Keywords: *Elections, KPU, Democratic Volunteers, Women, Majene District,*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin. Untaian rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat, hidayah dan anugerah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*, beserta orang-orang yang tetap setia meniti jalannya sampai akhir zaman.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari orang tua penulis, sebagai penyemangat hidup di dunia ini, yang sangat penulis cintai dan sayangi, ibu Haerah yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang dan pengorbanan. Untaian doa serta pengharapan tiada henti, yang hingga kapan dan dimanapun penulis tidak akan bisa membalasnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan serta saran-saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang senantiasa memberikan dukungannya dari awal hingga akhir. Ucapan terima kasih penulis haturkan dari lubuk hati terdalam kepada Ibu Dr. Gustiana .A Kambo, M.Si. selaku Pembimbing I sekaligus penasehat akademik bagi penulis

dan Ummi Suci Fathiyah.B, S.IP., M.Ip. selaku pembimbing II. Terima kasih karena telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina NK, MA, Selaku Rektor Universitas Hasanudduin Makassar beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Armin Arsyad selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
3. Drs. A. Yakub, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

6. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan informasi dan data sampai pada penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada kedua saudara saya Nurzakia dan Ilham beserta Keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih sudah selalu memberikan nasihat positif dan dukungan selama ini.
8. Terimakasih Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol FISIP Unhas) yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
9. Kepada saudara-saudara angkatan Delegasi 2015, Bos Poces, Syifa, Ayu, Liza, Dika, Fira, Susi, Astmha, Aswita, Nisa, Dilla, Nindy, Vivi, Dika, Nita, Ningrat, Evi Lembang, Upi, Dery, Evita, Syawal, Ime, Rahmat Rohyat, Marwah, Ubay, Ari, Adi, Siska, Kamal, Ical, Juned, lin, Sibga, Mira, Ifan, rahmat renaldy dan teman-teman mabar (Syarif alikhan, Asrunil, Galank, Fichri, Dianto, Jonny yauri). Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
10. Kepada teman-teman KKN PPM Kesehatan Polewali Mandar ZulKifli, Awal Mukhtamar, nadia Albugis, Martina jumadil, Ika Fitriana j, Lia, Ira, Irma, Sitti Khusnul Fadhilah, kak Saleh dan

Juskani Hakim yang memberi banyak pengalaman, pembelajaran dan menjadi keluarga kedua setelah keluarga kandung. Dimana keseruan, suka-duka yang dilewati bersama, saling membagi pengalaman dan ilmu bersama, dan sebagainya.

11. Untuk teman-teman dekat saya Seto aprilianto, fikri Haikal, Muh. Aksar, Nurul Hardianti, Nurhardianti Mukhtar, dan yang lainnya yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu terimakasih dorongan yang sudah diberikan kepada saya selama ini hingga saya mampu bangkit kembali untuk semangat menjalankan tugas kuliah.
12. Tim Marasa yang selalu mengajak liburan Fahri Anwar Rafi, Risma Aunia Haris, Ika fitriana j, Awal Mukhtamar, Zulkifli dan kak saleh terimah kasih banyak atas suportnya selama ini.
13. Terima kasih untuk om saya Muhammad Ishaq A dan adik sepupu saya Taufiq Akbar Hidayat yang yang banyak membantu saya selama di Makassar
14. Untuk salah satu sahabat terbaik saya Almarhum Ahmad Fauzan, tanpa beliau hari-hari selama perkuliahan akan teras lebih berat dari pada ini. Terimakasih banyak juga atas supportnya selama ini.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah berhubungan dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan,

perhatian, dukungan, bimbingan dan kerja samanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENERIMAAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
1.4.1 Manfaat Akademis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Teori Kelembagaan (<i>Institutional Theory</i>).....	9
2.2 Teori Partisipasi Politik.....	17
2.2.1 Partisipasi Pemilih dalam pemilu.....	22
2.3 Kerangka Pemikiran.....	24
2.4 Skema Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Lokasi Penelitian.....	27
3.2 Tipe Dan Dasar Penelitian.....	27
3.3 Sumber Data.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5 Teknik Penetapan Informan.....	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	35
4.1 Kabupaten Majene.....	35
4.1.1 Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Majene.....	36

4.1.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Majene	39
4.1.3	Jumlah Pemilih Tetap di Kabupaten Majene	39
4.2	KPUD Kabupaten Majene.....	40
4.3	Relawan demokrasi.....	41
4.3.1	Relawan demokrasi basis perempuan	42
BAB V HASIL PENELITIAN		45
5.1	Strategi Relawan Demokrasi Basis Perempuan.....	45
5.1.1	Pendekatan Formal	46
5.1.2	Pendekatan Informal.....	50
5.1.3	Pendekatan Melalui Media Massa.....	51
5.2	Kendala yang Dialami Relawan Demokrasi	53
5.3	Peningkatan Suara Pemilih Perempuan.....	58
5.3.1	Peningkatan Kualitas Pemilih Perempuan.....	58
5.3.2	Peningkatan Kuantitas Pemilih Perempuan	63
BAB VI PENUTUP		66
6.1	Kesimpulan	66
6.2	SARAN	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN		71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Demokrasi merujuk dari kata Yunani yang berarti kekuasaan oleh rakyat. Kebanyakan konsep tentang demokrasi didasarkan pada prinsip 'pemerintahan oleh rakyat'. Ini mengimplementasikan bahwa, sebenarnya rakyat memerintahkan diri mereka sendiri, mereka berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan penting yang mengatur kehidupan mereka dan menentukan nasib dari masyarakat mereka. Partisipasi ini dapat berlangsung dalam sejumlah bentuk. Dalam kasus demokrasi langsung, partisipasi rakyat dapat berupa keterlibatan secara langsung dan terus menerus dalam pembuatan keputusan, melalui sarana-sarana seperti referendum, pertemuan-pertemuan masyarakat atau bahkan televisi interaktif.¹

Keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah sebuah ukuran sebuah negara demokrasi. Korelasi antara demokrasi dan partisipasi sangat erat, apa arti demokrasi tanpa partisipasi. Pun sebaliknya, tanpa demokrasi jangan harap ada partisipasi, keduanya integral. Partisipasi warga negara adalah cara mereka untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah. Pentingnya

¹ Heywood, Andrew (2013) *politik edisi ke-4* pustaka pelajar: Yogyakarta. Hal 155

partisipasi inilah yang menjadi roh demokrasi. semakin banyaknya atau tingginya partisipasi maka legitimasinya pun juga akan lebih kuat²

Berbicara tugas dan fungsi KPU dalam mengawal dan membangun demokrasi. KPU dihadapkan dengan tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu 2019 yang lebih berat karena semakin kompleksnya penyelenggara pemilu. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif dan intensif juga dibutuhkan untuk menurunkan angka suara tidak sah atau *invalid vote* dalam pemilu. Partisipasi pemilih pada tahun sebelumnya yang cenderung menurun seperti pada Empat pemilu nasional terakhir yaitu pada tahun 1999 hingga tahun 2014 pelaksanaan pemilu di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu.

KPU dalam upayanya menyukseskan pemilu kemudian membuat Program relawan demokrasi. Relawan demokrasi adalah Gerakan yang dibuat secara kelembagaan oleh KPU yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong

² Ibid

tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.³

Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pilukada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada pemilu nasional misalnya, yaitu pemilu 1999 (92%), pemilu 2004 (84%), pemilu 2009 (71%), pemilu 2014 (73%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2019. Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.⁴

Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah yang ikut melaksanakan pemilu serentak di tahun 2019 dan yang menjadi fokus penulis ada di partisipasi pemilih perempuan. Perempuan dalam politik mengapa penting untuk dapat terlibat dalam dunia politik. Sebab di dalam memutuskan tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan, perempuan merupakan bagian dari objek

³ JURNIS Relawan Demokrasi <https://www.kpu.go.id> (Diakses pada 22 februari 2020, pukul 11.24 wita)

⁴ ibid

pembangunan, maka ia memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk memainkan peranannya, mengambil bagian untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan dan pemerataan serta berhak mendapatkan kesejahteraan hidup, apalagi peran perempuan dalam keluarga menjadi objek untuk menggapai kesuksesan tujuan pembangunan itu sendiri. Jika perempuan tidak ikut mengambil bagian didalamnya lalu siapayg akan memperjuangkan kepentingan perempuan dalam memutuskan suatu kebijakan pembanguna itu sendiri. Adapun bentuk partisipasi politik itu sendiri salahsatunya melalui pemberian suara (*voting behavior*)

Ketika dilihat beberapa kali pemilu di Kabupaten Majene dari data yang ada, jumlah partisipasi di pemilihan umum di kabupaten Majene beberapa tahun belakangan ini angka partisipasi cenderung stagnan. Namun jika kita pisahkan antara pemilih perempuan dan laki-laki, angka pemilih perempuan yang menggunakan haknya selalu berada dibawah laki-laki. Apalagi pada pemilih perempuan pada 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Dalam sebuah wawancara komisioner KPU Divisi sosialisasi Zulkarnain hasanuddin S.E mengatakan bahwa belajar dari beberapa segmen pemilu secara kuantitatif dalam DPT, presentase pemilih perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki., tetapi dari segi partisipasi perempuan paling rendah.⁵ Maka dari itu KPU melalui relawan program relawan demokrasi melakukan pengoptimalan berjalannya

⁵ KPU Majene harapkan partisipasi perempuan <http://wacana.info/berita/KP-Majene-harapkan-partisipasi-perempuan-pemilu-2019.com> (Di akses pada tanggal 12 juni 2020 pukul 10.17 wita)

relawan demokrasi di kabupaten Majene sehingga pada tahun 2019 ada peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Tabel 1.1

Kategori	Kategori	Pileg 2014	Pilpres 2014	Pilbup 2015	Pilgub 2017	Pilleg 2019
Pemilih	Laki-Laki	48363	52366	52291	53560	54317
	Perempuan	53785	55388	55173	56226	56567
	TOTAL	102148	107754	107464	109786	110884
Memilih	Laki-Laki	36744	43693	46319	47213	47001
	Perempuan	42954	38331	44091	43667	52883
	TOTAL	79698	82024	90410	90880	99884
Partisipasi	Laki-Laki	75,98%	83,44%	88,58%	88,15%	86,53%
	Perempuan	79,86%	69,20%	79,91%	77,66%	93,49%
	TOTAL	78,02%	76,12%	84,13%	82,78%	90,08%

Sumber: KPUD Kab. Majene 2020

Relawan demokrasi sudah dibentuk dari tahun 2014 tapi jika melihat dari data diatas jumlah pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilihnya masih rendah di tahun 2014 dan beberapa kali mengalami beberapa kali penurunan di priode pemilihan setelahnya. Ini mengindikasikan belum optimalnya kinerja relawan demokrasi pada tahun itu. Barulah pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan.

Dalam peningkatan partisipasi ini juga berdampak pada kualitas, sebab ketika angka partisipasi meningkat berbanding lurus dengan peningkatan kualitas itu sendiri sebab, kesadaran dalam menggunakan

hak pilih adalah suatu bentuk peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya menggunakan hak pilih. Semua ini tidak terlepas dari kinerja relawan demokrasi khususnya perempuan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih.

Peningkatan jumlah partisipasi masyarakat di kabupaten Majene khususnya perempuan itulah yang melatarbelakangi penelitian ini dan focus pada program apa saja yang dilakukan KPU melalui relawan demokrasi basis perempuan dalam meningkatkan jumlah partisipasi, Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengangkat judul penelitian **“Relawan Demokrasi Basis perempuan di Kabupaten Majene pada pemilu tahun 2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana strategi Relawan Demokrasi basis perempuan berdampak pada kualitas dan kuantitas pemilih perempuan pada Pemilu di kabupaten Majene tahun 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektifitas program Relawan Demokrasi basis perempuan dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Majene.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh setelah dilakukannya penelitian ini, ada dua aspek yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

Kedua aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis. Dari penelitian yang telah dilakukan dengan mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah mengenai Efektifitas relawan demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu.
2. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya politik kontemporer.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa ditempat lain.
2. Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai salah satu pra syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat dengan perubahan. Elemen-elemen ini secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Dalam upaya memberikan stabilitas ini maka sebuah lembaga perlu memperhatikan unsur-unsur seperti *rules*, *norms*, *cultural benefit*, peran dan sumber daya material. Hal inilah yang dapat membentuk komitmen organisasi dalam memberikan stabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang ada.

Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya; tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut (Meyer dan Rowan, 1977). Scott (2008) dalam Villadsen (2011) menyatakan bahwa teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi bahwa struktur, proses dan peran organisasi seringkali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan organisasi. Misalnya organisasi yang berorientasi pada layanan publik, dalam pengambilan keputusan sudah tentu dipengaruhi oleh keyakinan

dan aturan yang berlaku di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lingkungan masyarakat. Berangkat dari hal ini, maka dapat dijelaskan bahwa organisasi sebagai pihak yang menerapkan kebijakan harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya agar tujuan akhir dari sebuah kebijakan dapat tercapai.

Teori ini menjadi penjelas yang kuat dan populer bagi tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, eksternal, sosial, ekspektasi masyarakat, dan lingkungan (Ridha dan Basuki, 2012). Faktor-faktor ini cenderung menunjuk pada hubungan organisasi dengan pihak eksternal, seperti domain Negara (*state*), sektor swasta (*private*), akademisi dan masyarakat (*society*). Organisasi pemerintah selaku pihak internal memiliki legitimasi untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya kepada pihak eksternal. Dengan demikian dalam menjalankan fungsinya, organisasi rentan juga terhadap tekanan eksternal.

Bagi organisasi pemerintah, secara umum yang diutamakan adalah legitimasi dan kepentingan politik. Organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau sosial (DiMaggio dan Powell 1983; Ashworth *et al.*, 2009). Penyesuaian pada harapan eksternal atau sosial mengakibatkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal mereka dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal (Meyer dan Rowan, 1977). Secara tidak langsung,

kemauan organisasi tersebut telah menggambarkan kuatnya komitmen organisasi tersebut. Misalnya, jika masyarakat mengharapkan untuk menegakkan kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan maka idelnya organisasi harus mewujudkan hal tersebut demi kepentingan legitimasinya di mata masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Meyer dan Rowan (1977) bahwa banyak posisi, kebijakan, program dan prosedur internal organisasi dipengaruhi oleh opini publik, pandangan konstituen, pengetahuan sah melalui sistem pendidikan, prestise sosial, hukum, dan pengadilan. Inti dari pandangan tersebut adalah perilaku dan keputusan yang diambil oleh organisasi cenderung dipengaruhi oleh institusi yang ada di luar organisasi. Organisasi akan berupaya untuk menyesuaikan diri dengan harapan eksternal untuk mempertahankan eksistensi dan legitimasinya. Hal ini memang merupakan bentuk pengabdian organisasi pemerintah terhadap masyarakat. Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara sebagai fokus kajian utama. Setidaknya, ada dua jenis atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang berada pada titik "pemerintahan yang baik" atau *good governance* dan negara otoriter yang berada pada titik "pemerintahan yang jelek" atau *bad governance* dan kemudian berkembang lagi dengan banyak varian yang memiliki sebutan nama yang berbeda-beda. Bahasan tradisional dalam pendekatan ini menyangkut antara lain sifat undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembagakenegaraan

seperti parlemen dan lain-lain. Dengan kata lain, pendekatan ini mencakup unsur legal maupun institusional. Struktur memengaruhi individu, mengacu pada hal yang baik maupun buruk.

Setidaknya, ada lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni:⁶

1. Legalisme (*legalism*), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah dalam mengatur hukum;
2. Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang;
3. Holistik (*holism*) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik dalam artian lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif digunakan dalam pengkonsepan idealnya;
4. Sejarah atau historicism yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan;
5. Analisis normatif atau *normative analysis* yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan *good government*

⁶ Subakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. (Jakarta: PT Grasindo, 1992) hal.131.

Pendekatan kelembagaan muncul dan berkembang sebelum Perang Dunia II. Banyak pemikir-pemikir politik masa lampau yang mempengaruhi pendekatan ini. Pemikiran seperti yang berasal dari para filsuf Yunani seperti Plato atau Aristoteles sampai dengan filsuf politik modern diadopsi oleh pendekatan ini. Sehingga pendekatan ini dianggap lebih berat pada landasan filosofis dari ilmu politik. Pada awal perkembangannya, pendekatan ini berkembang sejalan dengan ilmu hukum. Karena itu pada masanya pendekatan ini banyak mengambil pembahasan mengenai mana yang hitam dan mana yang putih. Karena itulah pembahasan yang menjadi turunan dari pendekatan ini memiliki kecenderungan yang legal-formal. Alasan mengapa legal adalah karena dalam pendekatan ini politik selaludikaitkan dengan persoalan hukum. Sehingga pembahasannya banyak mengacu pada konstitusi dan hukum-hukum yang ada di dalam sebuah negara. Kita bisa mengambil Indonesia sebagai contoh. UUD 1945 adalah dasar konstitusional negara. Sehingga apa yang tercantum di dalam yang menjadi pembahasan analisa politik. Seperti contohnya dasar negara, bentuk negara, sistem pemerintah kita dan lain sebagainya. Semua yang ada di UUD 1945 dianggap sebagai suatu hal yang ideal dan harus dijalankan tanpa melihat kembali bagaimana relevansi dan signifikansinya di dalam realita.

Pendekatan ini disebut formal karena pembahasannya hanya seputar lembaga-lembaga dan struktur politik yang formal. Pembahasan yang akan muncul dengan demikian adalah mengenai lembaga eksekutif,

legislatif, dan yudikatif, partai-partai politik, sampai dengan sistem pemilu. Semuanya ini adalah lembaga formal yang ketentuannya diatur oleh negara. Yang menjadi unit analisisnya adalah kewenangan dari tiap-tiap lembaga tersebut yang terdapat dalam konstitusi. Tetapi apakah lembaga berfungsi dengan benar tidak menjadi unit analisa dari pendekatan kelembagaan. Selain itu pendekatan ini cenderung tidak melihat kekuatan-kekuatan politik yang berada di luar lembaga formal tersebut. Baik kelompok-kelompok informal, kepentingan, maupun media tidak menjadi bahan pengkajian dari pendekatan ini. Analisa Apter cukup bisa menjelaskan hal ini. Ia memandang bahwa kelompok-kelompok tersebut berusaha untuk mempengaruhi kebijakan tanpa memiliki kekuatan yang bisa dipertanggung jawabkan. Kemampuan kelompok-kelompok ini sangat terbatas. Berbeda dengan partai-partai politik yang memang secara konstitusional memiliki kemampuan untuk mempengaruhi langsung kebijakan dengan mengirimkan wakil mereka yang akan bersentuhan langsung dengan pembuatan kebijakan. Sehingga para teoritis kelembagaan melihat bahwa kekuatan kelompok ini sangat kecil dan tidak signifikan. Apter menilai bahwa pendekatan kelembagaan mencoba mengatakan bahwa saluran aspirasi maupun kekuatan untuk mempengaruhi hanya bisa terjadi melalui representasi pemerintah yang ada dalam sebuah negara.⁷

⁷ David E. Apter, *Introduction to Political Analysis* (Massachusetts: Winstrop Publisher, Inc, 1977) hal. 163.

Pendekatan kelembagaan memang sangat mengacu pada studi sejarah. Analisanya cenderung pada bagaimana perkembangan lembaga-lembaga Negara yang ada di suatu negara. Asal usul maupun perkembangan dari sebuah lembaga negara, termasuk cabang-cabang dari lembaga tersebut, menjadi pembahasan dari pendekatan ini. Karena berkembangnya pendekatan ini banyak di negara-negara barat, maka kecenderungannya para penganut pendekatan ini menggunakan lembaga-lembaga negara Barat, seperti Inggris, sebagai acuan studi mereka. Begitu juga dengan norma-norma demokrasi yang dianut juga berasal dari Barat. Karena terlalu mengacu pada sejarah, pendekatan ini akan cenderung tidak analitis. Sifat deskriptif dari pendekatan kelembagaan seringkali menyebabkan adanya generalisasi dari sistem-sistem politik di tiap negara. Padahal kondisi yang berbeda di tiap negara bisa menyebabkan fungsi yang berbeda dari lembaga yang pada dasarnya sama.⁸ Ini yang menjadi masalah ketika kita harus melihat realita dari perkembangan dunia setelah Perang Dunia II dan juga *Cold War* yang banyak membahas mengenai negara-negara Dunia Ketiga dengan sejarah yang jauh berbeda.

Menurut Miriam Budiarmo pada masa berkembangnya pendekatan ini penelitian mengenai kekuasaan belum berkembang.⁹ Kita bisa mengacu pada penjelasan Apter terkait masalah ini. Dalam bukunya, *Introduction to Political Analysis*, Apter menjelaskan bahwa para penganut

⁸ Miriam Budiarmo, "Pendekatan-Pendekatan dalam Ilmu Politik", Jurnal Politik, 1 (1989), hal.4.

⁹ Ibid,

pendekatan kelembagaan ini mengasumsikan bahwa kekuasaan bersifat privat, dapat digunakan secara kooperatif untuk menguntungkan baik yang memerintah maupun yang diperintah dan peran pemerintah begitu penting adanya.¹⁰ Bisa kita asumsikan bahwa para teoritis kelembagaan hanya melihat kekuasaan dari sebuah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai lembaga tertinggi negara. Tidak berkembangnya penelitian tentang kekuasaan tersebut dengan demikian disebabkan lagi-lagikarena pendekatan ini terlalu deskriptif dalam menjelaskan politik yang sebatas pada kewenangan masing-masing baik pemerintah maupun lembaga politik.

Dalam buku *Introduction to Political Analysis*, David E. Apter menjelaskan bagaimana pendekatan kelembagaan memberikan gambaran mengenai tujuan filosofis dari adanya pemerintah.¹¹ Kajian yang berputar pada kegunaan lembaga-lembaga pemerintahan sesungguhnya banyak memberikan kontribusi untuk pembangunan ilmu politik itu sendiri. Karena tak bisa dipungkiri pendekatan ini adalah yang pertama kali muncul dalam analisa-analisa politik. Dapat kita lihat bahwa sebenarnya sumbangsih pendekatan kelembagaan adalah penjelasan mengenai fungsi-fungsi lembaga politik dan juga pendekatan dengan melihat fungsi negara dan pemerintah. Salah satu peninggalan paling penting yang dihasilkan oleh pendekatan kelembagaan adalah bagaimana merumuskan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Kedua

¹⁰ David E. Apter, *Op.Cit.*, hal. 147.

¹¹ *Ibid*,

sistem ini terus menjadi perdebatan karena menyangkut representasi politik dalam sebuah negara dan pembagian kekuasaan. Kedua sistem ini juga yang menjadi pilihan sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Sehingga perkembangan yang telah dibuat dari kedua sistem ini menjadi dasar bagi perkembangan ilmu politik dalam menganalisa sistem pemerintahan di sebuah negara.

Dasar teori ini-lah yang penulis gunakan dalam mengkaji tugas KPU dalam hal ini KPUD Kabupaten Majene dalam meningkatkan suara pemilih didaerahnya. Dimana KPUD Kabupaten Majene adalah lembaga Negara yang memiliki tugas menyelenggarakan pemilu dan menjadi proses demokrasi berjalan sesuai aturan yang ada. Dalam kaitannya KPUD kabupaten Majene menggunakan Relawan Demokrasi yang berbasis pada perempuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum terkhusus pemilih perempuan. Pendekatan kelembagaan digunakan untuk melihat KPUD Kabupaten Majene menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada sebagai lembaga Negara penyelenggara pemilu sebab batasan pendekatan ini ada pada bagaimana melihat lembaga Negara dalam menjalankan kewenangannya dan mencapai tujuan dari lembaga tersebut.

2.2 Teori Partisipasi Politik

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya

studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca-industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru (*new social movement*). Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu (*single issue*) saja dengan harapan akan lebih efektif memengaruhi pengambilan keputusan melalui *direct action*.¹²

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.¹³

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 367.

¹³ *ibid*

keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang mengangkut atau mempengaruhi hidupnya.¹⁴

Prinsip partisipasi adalah masyarakat berpetan secara aktif dalam proses atau alur tahap program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill (PTO PNPM PPK, 2007). Sedangkan menurut Theodorson dalam mardikanto (1994) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.¹⁵

Dalam hubungan dengan negara-negara baru Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan.

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), Hlm. 140.

¹⁵ Budiarto, Miriam. *Partisipasi dan partai politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama) hlm 86

oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.¹⁶

Dalam menganalisis tingkat-tingkat partisipasi, Huntington dan Nelson membedakan dua sub dimensi :

- a. Lingkup, Seberapa besar partisipasi yang dilakukan atau seberapa banyak pihak yang terlibat dalam partisipasi.
- b. Intensitas, Seberapa lama dan seberapa penting sebuah partisipasi

Huntington dan Nelson juga mengategorikan partisipasi politik berdasarkan kesadaran politik seperti Otonom yaitu partisipasi atas dasar kesadaran sendiri dan Mobilisasi yaitu partisipasi dilakukan berdasarkan anjuran, ajakan atau paksaan pihak lain.

Namun harus disadari bahwa partisipasi politik otonom maupun dimobilisasi bukanlah sesuatu yang dikotomis, tapi merupakan sebuah spektrum. Karena banyak sekali bentuk partisipasi yang bersifat arbitrer, berada diantara partisipasi politik otonom atau mobilisasi.

Menurut Myron Weiner seperti dikutip oleh Mas' Oed, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi

¹⁶ Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1997), hlm 3.

lebih luas dalam proses politik, seperti yang disampaikan Myron Weiner yaitu:¹⁷

- a. Modernisasi; Komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang mengikat, menyebarnya kepandaian baca-tulis, pengembangan media komunikasi massa.
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial; ketika terbentuk suatu kelas baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern; kaum intelektual seperti sarjana, wartawan dan penulis sering mengeluarkan gagasan dan ide kepada masyarakat umum untuk membaktikan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Dan sistem transportasi, komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide dan gagasan tersebut.
- d. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik, jika timbul kompetisi perebutan kekuasaan, salah satu strategi yang digunakan adalah mencari dukungan rakyat untuk melegitimasi mereka melalui gerakan-gerakan partisipasi rakyat.

¹⁷ Arif Rahman, Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional (Surabaya: Penerbit SIC, 2002), Hlm 130-131

- e. Campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam masalah sosial, ekonomi, dan budaya; jika pemerintah terlalu menkooptasi masalah-masalah sosial masyarakat, maka lambat laun akan merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk berpartisipasi.

2.2.1 Partisipasi Pemilih dalam pemilu

Partisipasi politik merupakan aktifitas masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara bukan politisi atau pegawai negara. Partisipasi politik bersifat sukarela dan bukan dimobilisasi negara ataupun partai yang berkuasa. Meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa Lembaga sosial telah berperan besar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Seperti yang diaungkapkan oleh Friedmen dan Hechter yang menjelaskan adanya kemampuan dari lembaga sosial untuk memberikan sanksi positif dan negatif kepada masyarakat sehinggamemengaruhi masyarakat untuk menentukan ikut berpartisipasi ataukah tidak. Dari penjelasan Friedmen dan Hecdter tersebut dalam permasalahan partisipasi politik lembaga sosial mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam politik. Berdasarkan pengamatan peneliti, lembaga sosial yang turut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat antara lain adalah Partai Politik, Media Massa, dan KPUD,

- a. Partai Politik. Partai politik dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 10 disebutkan: “tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.”¹⁸ Selanjutnya dalam pasal 11 dijelaskan: “partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Sosialisasi dan pendidikan politik oleh Partai Politik sedikitnya dilakukan dalam tiga hal, yakni: melalui sosialisasi para kader, pendidikan politik, dan melalui optimalisasi organisasi sayap partai.
- b. Media massa. Di era globalisasi seperti saat ini, media memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Melalui media, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih mudah. Begitu juga dalam Pemilu, media menjadi saluran komunikasi yang sangat tepat untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang netral, saat ini media menjadi salah satu lembaga yang sangat dipercayai oleh masyarakat. Dengan begitu, dalam peningkatan partisipasi masyarakat media diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Terdapat tiga media yang sangat efektif digunakan dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Magetan yaitu: stasiun televisi, koran, social media.

- c. KPUD. Sebagai penyelenggara Pemilu KPUD memiliki peran utama meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam hal menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut termuat dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 10 menyebutkan bahwa: “Salah satu tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan sosialisasi dan penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat”. KPUD meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui cara sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat. Cara tersebut dilakukan melalui tiga tahapan yakni melalui komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media, dan melalui mobilisasi sosial.

2.3 Kerangka Pemikiran

Prinsip keterbukaan dan partisipasi adalah menjadi persoalan inti bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekaligus menjadi jiwa atas proses terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) yang akuntabel, partisipatif, berintegritas, transparansi dan berjalan damai. Keterbukaan akan informasi kepeiluan mendorong partisipasi pada setiap proses berjalannya tahapan pemilu. Yakni, mendorong partisipasi politik

masyarakat baik sebagai pemilih maupun sebagai peserta pemilu, tentu bukanlah hal yang mudah. Partisipasi itu menjadi penting untuk menjadi tolak ukur kualitas Demokrasi dan kehidupan politik dalam masyarakat disetiap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.

Kabupaten Majene selalu mengalami tren penurunan jumlah angka partisipasi pemilih perempuan tiap pemilu, sehingga Relawan Demokrasi tahun 2019 ini diharapkan mampu menyentuh masyarakat dari golongan perempuan. Melalui penelitian ini penulis ingin melihat bentuk tindakan yang dilakukan Relawan Demokrasi dengan menggunakan Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*) Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya; tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan sehingga hubungan antara lembaga dan masyarakat di kabupaten Majene bisa dirasakan pada Pemilu serentak tahun 2019 ini. Selain Teori kelembagaan, penulis juga ingin melihat tingkat partisipasi politik masyarakat kabupaten Majene dengan hadirnya kelompok Relawan Demokrasi sebagai organisasi yang dibuat secara legal melalui jalur kelembagaan sebagai bentuk pencapaian lembaga itu sendiri.

2.4 Skema Kerangka Pemikiran

